

## Harapan Menteri Susi kepada Presiden Jokowi di Periode Kedua



Menteri KKP Susi Pudjiastuti menenggelamkan 18 Kapal Perikanan Asing (KIA) ilegal di Perairan Pulau Datuk, Mempawah, Kalimantan Barat, Minggu (6/10). Pada tanggal 4 Oktober 2019, sebanyak 3 kapal juga telah dimusnahkan di Sambas. (Foto: KKP)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mempertahankan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang bidang usaha tertutup dan terbuka di sektor penanaman modal.

Dalam beleid tersebut, penangkapan ikan merupakan bidang usaha tertutup terhadap penanaman modal atau investasi asing.

Regulasi tersebut, kata Menteri Susi, harus dipertahankan. Sebab penting dalam upaya menjaga sumber daya alam laut milik rakyat Indonesia.

"Saya berdoa Pak Presiden tidak akan pernah revisi Perpres 44, karena itu komitmen beliau jaga sumber daya alam laut hanya untuk bangsa Indonesia," kata dia, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (9/10).

Menteri Susi menegaskan Perpres tersebut tidak berarti Indonesia bersikap tertutup terhadap investor asing. Pemodal asing tetap diizinkan masuk. Hanya memang bukan di sektor perikanan tangkap.

"Untuk prosesing, lain-lain, 100 persen sekarang (investor asing) boleh. Bikin pabrik perikanan 100 persen saham asing boleh. Itu keterbukaan kita," tegas dia.

Sebagai komoditas terbesar nomor dua yang diperdagangkan di dunia setelah minyak dan gas bumi (migas), sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia harus dilindungi. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara maritim harus memaksimalkan peluang tersebut.

"Komoditas nomor dua di dunia yang paling banyak diperdagangkan setelah migas, ya ikan. Barangkali kita ini baru tahu," terangya.

Selain itu, Indonesia telah bergabung dalam Forum Friends of Ocean Action. Tujuan forum ini sejalan dengan The Sustainable Development Goals (SDGs) ke 14, yaitu melestarikan dan menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan. Salah satunya menciptakan Samudera Pasifik bebas IUU Fishing pada tahun 2020.

Menghadapi ini, kata dia, para penangkap ikan ilegal tentu berusaha menggunakan cara 'legal' untuk masuk Indonesia. Salah satu modus yang kerap dilakukan di negara lain yakni dengan membeli perusahaan dalam negeri.

"Sekarang kita ditekan dengan 2020 bilang tak boleh ada illegal fishing. Nah sekarang pelaku-pelaku illegal fishing cari rumah, dengan segala cara. Mereka juga berusaha dengan segala cara masuk ke Indonesia," tandasnya